

RESEARCH ARTICLE

Struktur Teori Akuntansi dan Kualitas Informasi Keuangan Sektor Publik: Tinjauan Literatur

Susanty Ismail ^{1*}, Dita Aulia Buata ², Mattoasi ³, Hartati Tuli ⁴

^{1*,2,3,4} Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia.

Email: susanismai96@gmail.com ^{1*}, dbuata03@gmail.com ², mattoasi@ung.ac.id ³, hartati@ung.ac.id ⁴

Histori Artikel:

Dikirim 14 Agustus 2025; Diterima dalam bentuk revisi 10 Januari 2026; Diterima 20 Februari 2026; Diterbitkan 1 April 2026. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan Riset) – Lembaga KITA.

Suggested citation:

Ismail, S., Buata, D. A., Mattoasi, M., & Tuli, H. (2026). Struktur Teori Akuntansi dan Kualitas Informasi Keuangan Sektor Publik: Tinjauan Literatur. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 12(2), 1352-1359. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v12i2.6161>.

Abstrak

Kualitas informasi keuangan merupakan elemen penting dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan sektor publik. Berbagai reformasi akuntansi telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, namun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh struktur teori akuntansi yang mendasarinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis peran struktur teori akuntansi dalam membentuk kualitas informasi keuangan sektor publik. Penelitian ini menggunakan metode literature review terhadap jurnal-jurnal ilmiah yang membahas teori akuntansi, kualitas informasi keuangan, akuntansi berbasis akrual, dan standar akuntansi sektor publik. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan temuan literatur berdasarkan komponen struktur teori akuntansi, mekanisme pengaruh terhadap kualitas informasi keuangan, konteks institusional, serta implikasinya terhadap akuntabilitas publik dan pengambilan keputusan. Hasil kajian menunjukkan bahwa struktur teori akuntansi, yang mencakup teori agensi, teori akuntabilitas, dan pendekatan manajemen publik modern, berkontribusi terhadap kualitas informasi keuangan melalui penerapan akuntansi berbasis akrual, penguatan sistem pengendalian internal, dan peningkatan transparansi pelaporan. Kontribusi tersebut bersifat kontekstual dan bervariasi antar negara dan institusi, tergantung pada kapasitas institusional dan kualitas tata kelola. Penelitian ini menyimpulkan bahwa struktur teori akuntansi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas informasi keuangan sektor publik dan memperkuat akuntabilitas publik.

Kata Kunci: Teori Akuntansi; Kualitas Informasi Keuangan; Sektor Publik; IPSAS; SLR.

Abstract

The quality of financial information is a crucial element in ensuring accountability and transparency in public sector financial management. Various accounting reforms have been implemented to improve the quality of financial reporting; however, their effectiveness is largely influenced by the underlying structure of accounting theory. This study aims to examine the role of accounting theory structure in shaping the quality of financial information in the public sector. The method employed is a literature review of scholarly journals addressing accounting theory, financial information quality, accrual-based accounting, and public sector accounting standards. The analysis is conducted by categorizing the literature based on theoretical components, mechanisms of influence, institutional context, and the implications of financial reporting. The findings indicate that the structure of accounting theory, encompassing agency theory, accountability theory, and modern public management approaches, contributes to financial information quality through the adoption of accrual-based accounting, the strengthening of internal control systems, and enhanced reporting transparency. These contributions vary across countries and institutions depending on institutional capacity and governance quality. High-quality financial information has significant implications for improving public accountability and the effectiveness of decision-making. This study concludes that accounting theory structure plays a strategic role in enhancing the quality of public sector financial information.

Keyword: Accounting Theory; Financial Information Quality; Public Sector; IPSAS; Systematic Literature Review.

1. Pendahuluan

Kualitas informasi keuangan merupakan elemen fundamental dalam penyelenggaraan tata kelola sektor publik yang transparan dan akuntabel. Informasi keuangan yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan menjadi dasar bagi pemangku kepentingan dalam menilai kinerja pemerintah serta mengevaluasi penggunaan sumber daya publik secara bertanggung jawab (Anto & Yusran, 2023; Muda *et al.*, 2017). Dalam sektor publik, laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai penyedia informasi ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen utama pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat dan lembaga pengawas. Dalam praktiknya, berbagai negara masih menghadapi permasalahan terkait rendahnya kualitas informasi keuangan sektor publik. Permasalahan tersebut antara lain tercermin dari lemahnya sistem pengendalian internal, keterbatasan transparansi pelaporan, serta ketidakonsistenan penerapan standar akuntansi, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya keandalan dan kegunaan laporan keuangan (Muda *et al.*, 2017). Kondisi ini berpotensi melemahkan akuntabilitas publik, menghambat pengambilan keputusan yang berbasis informasi, serta menurunkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah. Sebagai respons atas permasalahan tersebut, reformasi akuntansi sektor publik terus dilakukan melalui penerapan akuntansi berbasis akrual dan adopsi International Public Sector Accounting Standards (IPSAS). IPSAS dipandang sebagai kerangka standar yang mampu meningkatkan transparansi, keterbandingan, dan kualitas informasi keuangan sektor publik lintas negara (Hilmi *et al.*, 2024; Schmidhuber *et al.*, 2022). Namun, temuan literatur menunjukkan bahwa adopsi standar akuntansi saja tidak secara otomatis menjamin peningkatan kualitas informasi keuangan, khususnya di negara berkembang dengan kapasitas institusional yang terbatas (Tawiah & Soobaroyen, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan kualitas informasi keuangan sektor publik tidak semata-mata bersifat teknis, tetapi juga berkaitan erat dengan struktur teori akuntansi yang mendasari sistem pelaporan keuangan. Struktur teori akuntansi, yang mencakup teori agensi, teori akuntabilitas, dan pendekatan manajemen publik modern, membentuk tujuan, orientasi, serta mekanisme pelaporan keuangan sektor publik (Dierynck & Verriest, 2020; Hien *et al.*, 2025). Teori-teori tersebut memengaruhi bagaimana informasi keuangan disusun, disajikan, dan dimanfaatkan sebagai alat pengendalian, komunikasi, dan pengambilan keputusan.

Sejauh ini, kajian mengenai kualitas informasi keuangan sektor publik masih cenderung terfragmentasi. Sebagian penelitian berfokus pada determinan teknis kualitas laporan keuangan, seperti sistem pengendalian internal dan sistem informasi akuntansi (Anto & Yusran, 2023; Muda *et al.*, 2017), sementara penelitian lain menitikberatkan pada adopsi IPSAS dan implikasi institusionalnya (Schmidhuber *et al.*, 2022; Tawiah & Soobaroyen, 2024). Keterpisahan ini menyebabkan belum adanya pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana struktur teori akuntansi secara keseluruhan berkontribusi terhadap kualitas informasi keuangan sektor publik. Meskipun berbagai reformasi akuntansi sektor publik telah dilakukan, termasuk penerapan akuntansi berbasis akrual dan adopsi IPSAS, literatur menunjukkan bahwa peningkatan kualitas informasi keuangan belum terjadi secara konsisten. Hal ini mengindikasikan bahwa permasalahan kualitas informasi keuangan sektor publik tidak semata-mata bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan struktur teori akuntansi yang mendasari tujuan, orientasi, dan mekanisme pelaporan keuangan. Namun demikian, kajian yang secara eksplisit mengintegrasikan struktur teori akuntansi dengan kualitas informasi keuangan sektor publik masih relatif terbatas dan terfragmentasi. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis peran struktur teori akuntansi dalam membentuk kualitas informasi keuangan sektor publik melalui pendekatan literature review. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi komponen struktur teori akuntansi yang digunakan dalam literatur sektor publik, menganalisis mekanisme pengaruhnya terhadap kualitas informasi keuangan, mengeksplorasi variasi kontribusi berdasarkan konteks institusional dan negara, serta menelaah implikasi kualitas informasi keuangan terhadap akuntabilitas publik dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan literatur akuntansi sektor publik dan menjadi rujukan bagi perumusan kebijakan serta praktik pelaporan keuangan yang lebih akuntabel.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Kualitas Informasi Keuangan dalam Sektor Publik

Penelitian mengenai kualitas informasi keuangan sektor publik telah berkembang secara signifikan, terutama dalam konteks reformasi akuntansi dan peningkatan akuntabilitas pemerintah (Muda *et al.*, 2017; Sundari. & A. Sudibyo, 2022). Studi empiris awal menempatkan kualitas laporan keuangan sebagai hasil dari faktor-faktor teknis pelaporan, seperti sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, dan kualitas sistem informasi akuntansi (Irafah *et al.*, 2020; Sundari. & A. Sudibyo, 2022). Muda *et al.*, (2017) secara empiris mengidentifikasi bahwa kelemahan sistem pengendalian internal dan keterbatasan kapasitas aparatur pemerintah daerah berkontribusi terhadap rendahnya kualitas laporan keuangan di Indonesia, yang menunjukkan bahwa kualitas informasi keuangan sangat dipengaruhi oleh kondisi organisasi dan sistem pendukung pelaporan. Temuan tersebut diperkuat oleh Irafah *et al.*, (2020) yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan peran internal audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sementara keberhasilan penerapan sistem informasi keuangan daerah tidak selalu berdampak langsung terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil ini menegaskan bahwa kualitas informasi keuangan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem, tetapi juga oleh kapasitas aktor yang mengoperasikannya serta efektivitas fungsi pengawasan internal (Irafah *et al.*, 2020). Dengan demikian, kualitas informasi keuangan sektor publik merefleksikan interaksi antara sistem, manusia, dan mekanisme pengendalian. Penelitian selanjutnya memperluas fokus tersebut dengan mengaitkan kualitas informasi keuangan dengan determinan tata kelola dan lingkungan institusional. Anto & Yusran, (2023) menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh kombinasi faktor struktural dan manajerial, termasuk penerapan standar akuntansi, efektivitas pengendalian internal, dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas. Sejalan dengan itu, (Sundari. & A. Sudibyo, (2022) menegaskan bahwa meskipun banyak pemerintah daerah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian, masih ditemukan berbagai permasalahan substantif dalam laporan keuangan, yang menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap standar tidak selalu identik dengan kualitas informasi yang bermakna bagi pengguna. Penelitian Rakhman & Wijayana, (2024) menemukan bahwa kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah juga dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti tingkat pembangunan manusia, yang mencerminkan kapasitas institusional dan kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. Namun, studi tersebut juga menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas aparatur dapat disertai dengan praktik manajemen akrual yang bersifat oportunistik, sehingga kualitas informasi keuangan menjadi fenomena yang kompleks dan tidak sepenuhnya bebas dari kepentingan aktor (Rakhman & Wijayana, 2024). Meskipun literatur empiris telah mengidentifikasi berbagai determinan kualitas informasi keuangan sektor publik, sebagian besar penelitian tersebut masih menempatkan kualitas informasi keuangan sebagai variabel dependen yang dijelaskan oleh faktor-faktor teknis, organisasional, dan kontekstual. Keterkaitan antara kualitas informasi keuangan dan struktur teori akuntansi yang mendasari sistem pelaporan sektor publik masih relatif terbatas, sehingga membuka ruang bagi pendekatan yang lebih teoretis dan reflektif.

2.2 Struktur Teori Akuntansi dan Akuntabilitas Publik

Kajian terbaru dalam akuntansi sektor publik menegaskan bahwa kualitas informasi keuangan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor teknis pelaporan, tetapi juga oleh struktur teori akuntansi dan tekanan institusional yang membentuk praktik akuntabilitas (Schmidhuber *et al.*, 2022; Jahja *et al.*, 2024; Hien *et al.*, 2025). Struktur teori akuntansi sektor publik secara konseptual dibangun terutama atas teori agensi dan teori akuntabilitas. Dalam perspektif teori agensi, kualitas informasi keuangan berfungsi sebagai mekanisme untuk mengurangi asimetri informasi antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat atau pemangku kepentingan sebagai principal (Dierynck & Verriest, 2020). Pelaporan keuangan dalam kerangka ini dipandang sebagai alat monitoring yang bertujuan meningkatkan disiplin, efisiensi, dan kinerja organisasi publik. Namun, pendekatan agensi memiliki keterbatasan dalam menjelaskan kompleksitas sektor publik, terutama ketika tujuan organisasi tidak semata-mata berorientasi pada efisiensi ekonomi. Jahja *et al.*, (2024) menunjukkan bahwa penerapan mekanisme tata kelola berbasis agensi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia justru berkorelasi negatif dengan kinerja,

RESEARCH ARTICLE

terutama ketika dipengaruhi oleh koneksi politik dan tekanan institusional. Studi ini menjelaskan bahwa praktik tata kelola sering kali bersifat koersif dan mimetik, sehingga lebih berfungsi sebagai alat legitimasi formal daripada mekanisme pengendalian substantif (Jahja *et al.*, 2024). Oleh karena itu, literatur akuntansi sektor publik mengembangkan pendekatan berbasis teori akuntabilitas. Hien *et al.*, (2025) menekankan bahwa accountability-based accounting memandang akuntansi sebagai sarana pertanggungjawaban substantif, di mana kualitas informasi keuangan berperan dalam membentuk kesadaran etis, perilaku aparatur, dan legitimasi publik. Dalam perspektif ini, kualitas informasi keuangan tidak hanya dinilai dari kepatuhan terhadap standar, tetapi juga dari kemampuannya merepresentasikan realitas pengelolaan sumber daya publik secara jujur dan dapat dipahami. Pendekatan institusional yang digunakan oleh Jahja *et al.*, (2024) juga menunjukkan bahwa kualitas informasi keuangan dan praktik pelaporan sering kali dibentuk oleh tekanan politik dan kebutuhan legitimasi, bukan semata-mata oleh pertimbangan efisiensi dan transparansi. Perbandingan antara teori agensi dan teori akuntabilitas menunjukkan bahwa teori agensi menekankan fungsi pengendalian, sementara teori akuntabilitas dan institusional menyoroti fungsi komunikasi, legitimasi, dan konteks sosial pelaporan keuangan. Namun demikian, literatur masih jarang mengintegrasikan kedua perspektif tersebut secara simultan dalam menjelaskan kualitas informasi keuangan sektor publik.

2.3 IPSAS dan Reformasi Akuntansi Sektor Publik

Adopsi International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) menjadi salah satu fokus utama dalam literatur akuntansi sektor publik kontemporer. Schmidhuber *et al.*, (2022) menunjukkan bahwa IPSAS dikembangkan sebagai respons terhadap kebutuhan akan transparansi, keterbandingan, dan peningkatan kualitas informasi keuangan sektor publik lintas negara. IPSAS merepresentasikan penerjemahan operasional dari struktur teori akuntansi berbasis akrual dan akuntabilitas. Namun, hasil penelitian mengenai dampak IPSAS terhadap kualitas informasi keuangan menunjukkan temuan yang beragam. Hilmi *et al.*, (2024) menemukan bahwa implementasi IPSAS di negara berkembang sering kali menghadapi kendala keterbatasan sumber daya manusia dan kapasitas institusional, sehingga adopsi standar tidak secara otomatis meningkatkan kualitas informasi keuangan. Temuan ini sejalan dengan Sundari. & A. Sudibyo, (2022) yang menegaskan bahwa kepatuhan terhadap standar akuntansi tidak selalu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas secara substantif. Lebih lanjut, Anttila & Oulasvirta, (2025) melalui studi kasus di Finlandia menunjukkan adanya resistensi terhadap adopsi IPSAS 43 karena pertimbangan budaya akuntansi, biaya implementasi, dan relevansi informasi bagi pengguna laporan keuangan sektor publik. Studi ini menegaskan bahwa harmonisasi standar internasional dapat berbenturan dengan praktik akuntansi domestik yang telah mapan, sehingga kualitas informasi keuangan sangat bergantung pada kesesuaian antara standar, konteks institusional, dan tujuan akuntabilitas (Anttila & Oulasvirta, 2025). Tawiah & Soobaroyen, (2024) menunjukkan bahwa adopsi IPSAS juga dapat berfungsi sebagai sinyal legitimasi dan kredibilitas, khususnya dalam meningkatkan akses pembiayaan pemerintah di negara berkembang. Dengan demikian, kualitas informasi keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian internal, tetapi juga sebagai mekanisme legitimasi eksternal. Perbedaan temuan dalam literatur ini menunjukkan bahwa kontribusi IPSAS terhadap kualitas informasi keuangan sektor publik bersifat kontekstual dan sangat dipengaruhi oleh struktur teori akuntansi dan lingkungan institusional tempat standar tersebut diterapkan.

2.4 Celah Penelitian dan Kerangka Teoretis

Berdasarkan sintesis literatur, dapat diidentifikasi beberapa celah penelitian utama. Pertama, sebagian besar studi empiris masih menganalisis kualitas informasi keuangan sektor publik dari perspektif teknis dan institusional secara terpisah, tanpa mengaitkannya secara eksplisit dengan struktur teori akuntansi yang mendasari sistem dan praktik pelaporan keuangan. Kedua, kajian mengenai International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) umumnya berfokus pada isu adopsi dan implementasi, sementara mekanisme teoretis yang menjelaskan bagaimana standar tersebut membentuk orientasi akuntabilitas dan kualitas informasi keuangan belum banyak dieksplorasi. Ketiga, meskipun perbedaan konteks institusional sering diakui sebagai faktor penting, faktor tersebut belum terintegrasi secara utuh dalam satu kerangka

RESEARCH ARTICLE

konseptual yang menjelaskan variasi kualitas informasi keuangan sektor publik. Celah-celah tersebut menunjukkan bahwa reformasi akuntansi sektor publik berisiko bersifat simbolik apabila tidak ditopang oleh pemahaman teoretis yang kuat. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan sintesis literatur yang menempatkan struktur teori akuntansi sebagai landasan konseptual untuk menjelaskan kualitas informasi keuangan sektor publik. Struktur teori akuntansi dipahami sebagai kerangka yang mengintegrasikan teori agensi, teori akuntabilitas, standar akuntansi sektor publik, dan konteks institusional dalam membentuk kualitas informasi keuangan, sehingga memberikan dasar teoretis yang jelas bagi perumusan pertanyaan penelitian.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode literature review untuk memperoleh pemahaman konseptual mengenai peran struktur teori akuntansi dalam membentuk kualitas informasi keuangan sektor publik. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mensintesis dan mengintegrasikan temuan-temuan penelitian sebelumnya yang masih terfragmentasi, khususnya terkait teori akuntansi, kualitas pelaporan keuangan, dan reformasi akuntansi sektor publik (Schmidhuber *et al.*, 2022). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui analisis dokumen terhadap artikel jurnal peer-reviewed yang membahas teori akuntansi, kualitas laporan keuangan, akuntansi berbasis akrual, International Public Sector Accounting Standards (IPSAS), serta akuntabilitas sektor publik. Literatur yang dianalisis mencakup studi empiris dan kajian literatur yang relevan dengan konteks sektor publik di berbagai negara (Hilmi *et al.*, 2024). Analisis literatur dilakukan secara tematik berdasarkan empat *research question*, yaitu:

- 1) Komponen struktur teori akuntansi yang digunakan dalam literatur sektor publik untuk menjelaskan kualitas informasi keuangan;
- 2) Mekanisme pengaruh struktur teori akuntansi terhadap kualitas informasi keuangan sektor publik;
- 3) Variasi kontribusi struktur teori akuntansi berdasarkan konteks institusional dan negara; serta
- 4) Implikasi kualitas informasi keuangan terhadap akuntabilitas publik dan pengambilan keputusan.

Dengan pendekatan ini, penelitian mampu mengaitkan kerangka teoretis, konteks institusional, dan implikasi praktis kualitas informasi keuangan sektor publik secara sistematis dan komprehensif.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil

Literatur akuntansi sektor publik secara konsisten menempatkan teori agensi, teori akuntabilitas, serta pendekatan *New Public Management* (NPM) sebagai fondasi utama yang menjelaskan kualitas informasi keuangan, di mana teori agensi berfokus pada pengendalian dan pengurangan asimetri informasi, sementara teori akuntabilitas menekankan pertanggungjawaban serta legitimasi publik, dengan International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) berperan sebagai kerangka operasional yang menerjemahkan orientasi teoretis ini ke dalam praktik pelaporan melalui akuntansi berbasis akrual. Mekanisme pengaruh struktur teori tersebut terhadap kualitas informasi keuangan mencakup penerapan akuntansi akrual, penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kualitas sistem informasi akuntansi, serta transparansi dan pengungkapan laporan yang lebih baik, tidak hanya secara teknis tetapi juga membentuk perilaku aparatur publik dalam meningkatkan kesadaran akuntabilitas dan tanggung jawab substantif pelaporan. Namun, kontribusi ini bersifat kontekstual dan bervariasi antarnegara; di negara dengan kapasitas institusional serta tata kelola yang kuat, adopsi IPSAS dan akuntansi akrual cenderung menghasilkan peningkatan kualitas informasi yang konsisten, sedangkan di negara berkembang, keterbatasan sumber daya manusia, pengawasan, dan infrastruktur sering kali membatasi

RESEARCH ARTICLE

efektivitas reformasi tersebut sehingga adopsi standar tidak otomatis menjamin hasil yang lebih baik. Secara keseluruhan, kualitas informasi keuangan yang dihasilkan dari struktur teori ini membawa implikasi luas, seperti peningkatan akuntabilitas publik, penguatan legitimasi institusional, dukungan pengambilan keputusan dan kebijakan publik, serta berfungsi sebagai sinyal kredibilitas yang meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan akses pembiayaan pemerintah, terutama di negara berkembang.

Table 1. Temuan Penelitian

Research Question	Fokus Analisis	Temuan Utama	Sumber Utama
RQ1	Struktur teori akuntansi	Teori agensi, teori akuntabilitas, NPM, dan IPSAS menjadi kerangka utama dalam menjelaskan kualitas informasi keuangan sektor publik	Dierynck & Verriest, (2020); Hien <i>et al.</i> , (2025); Schmidhuber <i>et al.</i> , (2022)
RQ2	Mekanisme pengaruh	Akuntansi berbasis akrual, sistem pengendalian internal, sistem informasi akuntansi, dan transparansi pelaporan meningkatkan kualitas informasi keuangan	Anto & Yusran, (2023); Irafah <i>et al.</i> , (2020); Muda <i>et al.</i> , (2017)
RQ3	Konteks institusional	Efektivitas struktur teori akuntansi bervariasi antar negara, tergantung kapasitas institusional dan kualitas tata kelola	Hilmi <i>et al.</i> , (2024); Sundari. & A. Sudibyo, (2022)
RQ4	Implikasi	Kualitas informasi keuangan meningkatkan akuntabilitas publik, legitimasi institusional, dan akses pembiayaan	Hien <i>et al.</i> , (2025); Tawiah & Soobaroyen, (2024)

4.2 Pembahasan

Hasil penelitian menegaskan bahwa kualitas informasi keuangan sektor publik tidak dapat dipahami secara teknis semata, melainkan sebagai produk dari struktur teori akuntansi yang mendasari sistem pelaporan. Dominasi teori agensi dan teori akuntabilitas menunjukkan bahwa pelaporan keuangan sektor publik memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai mekanisme pengendalian dan sebagai sarana pertanggungjawaban public (Dierynck & Verriest, 2020; Hien *et al.*, 2025). Mekanisme seperti penerapan akuntansi berbasis akrual dan penguatan sistem pengendalian internal konsisten dengan temuan empiris sebelumnya yang menekankan pentingnya sistem dan proses pelaporan dalam menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas (Irafah *et al.*, 2020; Muda *et al.*, 2017). Namun, penelitian ini memperluas pemahaman tersebut dengan menempatkan mekanisme teknis dalam kerangka teori akuntansi, sehingga menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik. Variasi kontribusi struktur teori akuntansi berdasarkan konteks institusional menunjukkan bahwa adopsi IPSAS bersifat kondisional. Temuan ini memperkuat argumen bahwa reformasi akuntansi sektor publik di negara berkembang sering kali menghadapi hambatan implementasi akibat keterbatasan kapasitas institusional dan sumber daya (Hilmi *et al.*, 2024). Di sisi lain, hubungan antara kualitas informasi keuangan dan akses pembiayaan pemerintah menegaskan fungsi pelaporan keuangan sebagai alat legitimasi dan sinyal kredibilitas institusional (Tawiah & Soobaroyen, 2024).

5. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas informasi keuangan sektor publik sangat dipengaruhi oleh struktur teori akuntansi yang mendasari sistem dan praktik pelaporan keuangan. Teori agensi, teori

RESEARCH ARTICLE

akuntabilitas, dan pendekatan manajemen publik modern yang diimplementasikan melalui standar akuntansi sektor publik, seperti IPSAS, membentuk tujuan dan karakteristik kualitas informasi keuangan. Pengaruh tersebut tercermin melalui penerapan akuntansi berbasis akrual, penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan transparansi dan pengungkapan, serta pembentukan perilaku akuntabilitas aparatur publik. Temuan penelitian juga menegaskan bahwa kontribusi struktur teori akuntansi terhadap kualitas informasi keuangan bersifat kontekstual. Perbedaan kapasitas institusional, kualitas tata kelola, dan kesiapan sumber daya menyebabkan efektivitas reformasi akuntansi sektor publik bervariasi antar negara dan antar institusi. Oleh karena itu, adopsi standar akuntansi tertentu tidak secara otomatis menjamin peningkatan kualitas informasi keuangan tanpa dukungan lingkungan institusional yang memadai. Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dengan mengintegrasikan teori akuntansi, mekanisme pelaporan, dan konteks institusional dalam menjelaskan kualitas informasi keuangan sektor publik. Dari sisi praktis, hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kualitas informasi keuangan tidak cukup dilakukan melalui perubahan standar akuntansi saja, tetapi juga memerlukan penguatan kapasitas institusional dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji hubungan ini secara empiris, termasuk dengan mempertimbangkan peran transformasi digital dan sistem informasi akuntansi sektor publik.

6. Referensi

- Anto, L. O., & Yusran, I. N. (2023). Determinants of the quality of financial reports. *International Journal of Professional Business Review*, 8(3), 1–40. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i3.1331>.
- Anttila, V., & Oulasvirta, L. O. (2025). A case of unwillingness to adopt an international accounting standard: Lease accounting in Finnish municipalities. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 37(6), 286–301. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-11-2024-0225>.
- Dierynck, B., & Verriest, A. (2020). Financial reporting quality and peer group selection. *Management Accounting Research*, 47, Article 100675. <https://doi.org/10.1016/j.mar.2019.100675>.
- Hien, N. T. T., Hai, P. H., Bui, T. T. T., & Tuan, D. A. (2025). Structural equation modeling of factors affecting accountability-based accounting in public sector entities. *Emerging Science Journal*, 9(4), 2162–2178. <https://doi.org/10.28991/ESJ-2025-09-04-023>.
- Hilmi, Y., Hajrioui, Z., & El Kezazy, H. (2024). Systematic review of IPSAS standards: The introduction of IPSAS in public establishments. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 8(5), 292–306. <https://doi.org/10.55214/25768484.v8i5.1687>.
- Irafah, S., Nurmala Sari, E., & Muhyarsyah. (2020). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, peran internal audit, dan kesuksesan penerapan sistem informasi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 1(2), 165–180. <https://doi.org/10.51713/jarac.v1i2.16>.
- Jahja, N. J., Mohammed, N. F., & Lokman, N. (2024). Corporate governance and Indonesian state-owned companies' performance: Agency and institutional perspectives. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 8(3), 181–196. <https://doi.org/10.55214/25768484.v8i3.867>.
- Muda, I., Harahap, A. H., Erlina, Ginting, S., Maksum, A., & Abubakar, E. (2017). Factors of quality of financial report of local government in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 8, 68–74. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/8/1/012345>.

RESEARCH ARTICLE

Rakhman, F., & Wijayana, S. (2024). Human development and the quality of financial reporting among the local governments in Indonesia. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 56, Article 100634. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2024.100634>.

Schmidthuber, L., Hilgers, D., & Hofmann, S. (2022). International Public Sector Accounting Standards (IPSASs): A systematic literature review and future research agenda. *Financial Accountability & Management*, 38(1), 119–142. <https://doi.org/10.1111/faam.12265>.

Sundari, & Sudibyo, Y. A. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan: Sebuah literatur review. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 17(2), 140–150. <https://doi.org/10.52062/jaked.v17i2.2582>.

Tawiah, V., & Soobaroyen, T. (2024). The relationship between the adoption of international public sector accounting standards and sources of government financing: Evidence from developing countries. *Accounting Forum*, 48(2), 307–330. <https://doi.org/10.1080/01559982.2022.2151073>.